



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan: 1. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN); 2. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS); dan 3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	22 (dua puluh dua)
Hari/Tanggal	:	Kamis, 18 Juli 2019
W a k t u	:	Pukul 17.25 s.d 20.35 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FGerindra), didampingi oleh: 1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/FPAN); 2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPD); 3. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FHanura).
Sekretaris Rapat	:	Anita Handayaniputri, S.T., M.T. (Plh. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
Hadir	:	1. dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala BSN beserta jajaran; 3. Plt. Kepala BPKS beserta jajaran; 4. Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Plt. Kepala BPKS, dan Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam dibuka pukul 17.25 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP adalah membahas mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor: AG/09713/DPR RI/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 hal Penyampaian Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala BSN, Plt. Kepala BPKS, dan Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam untuk menjelaskan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Kepala BSN, Plt. Kepala BPKS, dan Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam.

II. KESIMPULAN

A. BADAN STANDARDISASI NASIONAL

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp177.987.242.239,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 96,92% dari pagu sebesar Rp183.641.416.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) atau sudah melampaui persentase angka realisasi nasional sebesar 91,68%.
2. Komisi VI DPR RI mendukung upaya tindak lanjut yang telah dilakukan Badan Standardisasi Nasional dalam menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Standardisasi Nasional terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

B. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

1. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam agar dalam tahun-tahun berikutnya harus meningkatkan kinerja anggarannya karena realisasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp1.368.887.676.077,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah) atau 66,9% dari pagu sebesar Rp2.046.159.533.000,00 (dua triliun empat puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
2. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk memperbaiki manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam termasuk pengelolaan, pengendalian dan akuntabilitas keuangan serta segera menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

C. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

1. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang agar dalam tahun-tahun berikutnya harus meningkatkan kinerja anggarannya karena realisasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp152.957.688.389,00 (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 68,02% dari pagu sebesar Rp224.864.020.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).

2. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk memperbaiki manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang termasuk pengelolaan, pengendalian dan akuntabilitas keuangan serta segera menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.35 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A.
A-361**